

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan Kepada Allah SWT, karena atas bimbingan dan tuntunan-Nya kami dapat menyusun Narasi Renstra Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tepat pada waktunya sesuai dengan rencana.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal terpenting. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berupaya untuk menyelesaikan Penyusunan Laporan Narasi Renstra Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan mengacu pada Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri ATR terkait Rencana Tata Ruang Wilayah. Serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024 sebagai pedoman bagi Kementerian / Lembaga dalam menyusun Renstra. Dalam peraturan ini, penyusunan Renstra tampak lebih sederhana, padat dan komunikatif jika dibandingkan dengan penyusunan laporan renstra tahun-tahun sebelumnya. Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tahun 2020-2024 disusun dengan memperhatikan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Disesuaikan pula dengan potensi-potensi yang ada di daerah

Dengan disusunnya rencana strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan. Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan pihak-pihak yang terkait.

Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Narasi Renstra ini, semoga Laporan ini bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua.

Pelaihari, Desember 2020
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT


SYAMSU WIJANA, S.SiT., M.Si
NIP. 19690907 199103 1 003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1-7

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN
 LEMBAGA..... 8-9

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
 KERANGKA KELEMBAGAAN.....10-13

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 14-16

BAB V PENUTUP 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten TanahLaut	2
Gambar 2. FungsiKementerianATR/BPN	2
Gambar 3. Permasalahan dan Aspek Strategis Kantor Pertanahan KabupatenTanahLaut	3
Gambar 4. Visi Misi danSasaran Strategis	9
Gambar 5. Visi Tambahan Untuk RencanaStrategisNasional	10
Gambar 6. Agenda Pembangunan	11
Gambar 7. Prioritas Pembangunan Nasional	11
Gambar 8. Cascading Level Kementerian	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Permasalahan, Arah Kebijakan dan Strategi Penyelesaian	13
---	----

BAB I

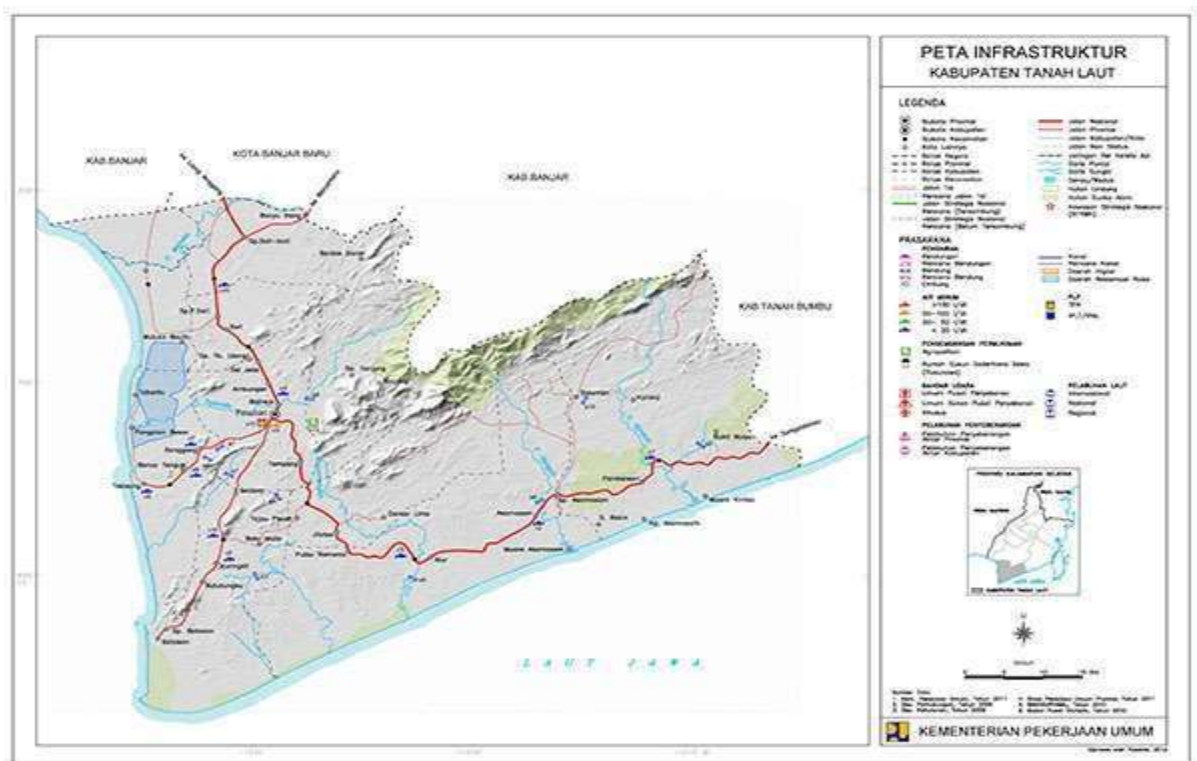
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan potensial. dengan luas wilayah daratan Indonesia 1.922.570 km² dari total seluas 5.180.053 km² (total daratan dan perairan) Dari total luas daratan, sekitar 124 juta hektar (64,93%) masih berupa kawasan hutan dan seluas 67 juta hektar (35,07%) telah dibudidayakan melalui berbagai kegiatan. Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada pada jalur lintas antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu poros perdagangan global.

Kalimantan sebagai salah satu kepulauan terbesar di Indonesia yang memiliki 4 propinsi salah satunya Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupatennya, ibukota kabupaten terletak di Pelaihari.

Kabupaten Tanah Laut terletak di 114° 30'20" – 115° 23'31" BT dan 3°30'33" – 4°11'38" LS dengan luas wilayah 3.631.35 KM² terbagi atas 11 kecamatan dan 130 desa dan 5 kelurahan. Batas wilayah administrasi di sebelah utara adalah Kabupaten Banjar, Sebelah Timur Kabupaten Tanah Bumbu dan sebelah Selatan serta barat berbatasan dengan Laut Jawa. Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah penduduk sebanyak 343.819 Jiwa. Luas wilayah yang cukup luas dan kegiatan ekonomi masyarakat yang beragam dan berkembang menjadi potensi yang cukup baik terkait kegiatan Pertanian. Oleh karena itu, tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut ini menjadi sangat strategis, tidak hanya ikut serta berkontribusi positif terhadap pembangunan Kabupaten Tanah Laut secara umum tetapi juga turut serta untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Tanah Laut



Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kementerian memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dengan *core function* sebagai berikut:

Gambar 2. Fungsi Kementerian ATR/BPN



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan dengan *core function* sebagai berikut:

Gambar 3 Core Function



1. Kondisi Umum

Wilayah Kabupaten Tanah Laut relative lebih luas dibandingkan dengan beberapa kabupaten atau kota yang lain yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan, dengan jumlah kecamatan sebanyak 11 dan 135 desa/kelurahan serta perkembangan perekonomian yang dinamis didukung letak yang cukup strategis tidak terlalu jauh dari ibukota propinsi yaitu 60 KM dari Kota Banjarmasin. Mata pencaharian penduduk pun cukup beragam sehingga geliat perekonomian juga sangat terasa. Penggunaan lahan Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh lahan budidaya terutama tanaman perkebunan/tahunan serta lahan pertanian basah dan kering. Sektor-sektor industri, perkebunan dan pertanian juga berkembang pesat diiringi dengan pembangunan permukiman yang semakin bertambah, semua aspek tersebut mengharuskan adanya regulasi yang tepat dan aplikatif demi mendukung pembangunan Kabupaten Tanah Laut, salah satunya dengan penetapan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 tahun 2016 pada tanggal 07 September 2016 berlaku tahun 2016 – 2036. Perda Tata Ruang menjadi penting mengingat ditetapkannnya urusan tata ruang menjadi satu kesatuan dengan Kementerian Agraria, maka ada peluang untuk dapat memperbaiki *fragmentasi* pelaksanaan penataan ruang yang terjadi selama ini.

Perkembangan terakhir yang disajikan oleh beragam media berupa respon terkait aktivitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang merefleksikan upaya tersebut. Beberapa isu yang memang menjadi *concern* bersama misalnya integrasi hak atas tanah dan pemanfaatan ruang, kebutuhan akan *one map policy* (peta yang terintegrasi), dan

penggabungan urusan penataan ruang di Kementerian Pekerjaan Umum ke dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang merupakan Rencana strategis sebelumnya.

Sasaran Strategis Renstra ATR/BPN 2020-2024 berdasarkan *Land Management Paradigm (LMP)* yaitu:

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan melalui:
 - Pengelolaan Pertanahan dengan sasaran strategis yaitu Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif untuk Rakyat (Aspek Sosial dan Ekonomi)
 - Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan dengan sasaran strategis yaitu Peningkatan kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang (Aspek Lingkungan)
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia melalui Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan sasaran strategis yaitu terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik (Aspek Manajemen dan Pengawasan).

Untuk mewujudkan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang terpercaya dan Berstandar Dunia, dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong", merupakan pekerjaan besar sekaligus pekerjaan mulia yang diamanahkan pada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Untuk mewujudkan harapan-harapan semua pihak akan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, serta untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilaksanakan kementerian berjalan secara *sistematis, terukur, terarah* dan *berorientasi* pada hasil (*outcome*) perlu disusun rencana strategis kementerian untuk lima tahun kedepan (2020-2024).

2. Potensi dan Permasalahan

Ruang dan tanah merupakan dua objek yang saling berkaitan dalam konteks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan. Isu strategis yang muncul terkait “backlog” tata ruang, juga bertautan dengan isu sinkronisasi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan tanah. Berdasarkan pemetaan evaluasi dan data eksisting bersumber dari Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, maka isu strategis bidang tata ruang saat ini adalah “Rendahnya Kepastian & Ketaatan dalam Penataan Ruang”.

Sampai dengan saat ini isu ketimpangan masih menjadi isu besar. Salah satu agenda untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah adalah melalui reforma agraria. Reforma Agraria memiliki dua bentuk yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah.

Ketiadaan sertifikat kepemilikan tanah tidak hanya membuat masyarakat sulit memperoleh akses ke lembaga keuangan formal, namun juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu sengketa serta konflik. Sampai dengan saat ini, menghadirkan jaminan

kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masih menjadi PR yang harus segera diselesaikan oleh jajaran Kanwil dan Kantah propinsi Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, Kantor Pertanahan perlu mempercepat penuntasan pendaftaran bidang tanah di wilayah Tanah Laut.

Selain hasil dan penetapan penanganan tanah terlantar, ketersediaan tanah yang dapat dibagikan kepada buruh tani dan petani gurem, juga disebabkan oleh penertiban atas tanah-tanah bekas hak, tanah absentee, dan tanah kelebihan maksimum. Tanah-tanah bekas hak memunculkan masalah karena bekas pemegang haknya meng-claim masih berhak untuk memanfaatkan atau menggunakan tanah tersebut dengan alasan masih memiliki hak keperdataan.

Kinerja institusi tidak hanya diukur oleh internal kementerian/lembaga, tetapi juga diukur oleh institusi independen baik nasional maupun global. Gambaran umum kinerja tersebut dapat diukur melalui indikator *Ease of Doing Business* tahunan yang dirilis oleh Bank Dunia. Indeks *Ease of Doing Business* Indonesia berada di peringkat ke-73 di antara 190 ekonomi global dalam kemudahan melakukan bisnis dengan skor 67,96. Dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah menetapkan target indikator *Ease of Doing Business* dalam Renstra K/L sehingga diharapkan seluruh Kanwil dan Kantah dapat mendukung tercapainya target indikator EoDB tersebut.

Isu Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN terdiri dari tiga aspek yaitu:

1. Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan belum berkualitas dan berdaya saing.

Hal ini disebabkan oleh Reformasi Birokrasi belum optimal. Sampai dengan tahun 2020 Nilai Indeks RB Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebesar 75. Selain itu kondisi yaitu: Penataan peraturan perundang-undangan belum efektif dan tepat sasaran; Kelembagaan belum efektif dan efisien; Penataan tata laksana belum maksimal Manajemen SDM belum optimal Akuntabilitas kinerja masih rendah Pelayanan publik belum maksimal.

2. Penyelenggaraan pengelolaan pertanahan belum sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan Rakyat.

Hal ini terjadi disebabkan antara lain : Ketimpangan Pemilikan Tanah Masih Tinggi, Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria Belum Meningkat, Belum Terwujudnya Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah serta Belum Mendukung Kemudahan dalam Berinvestasi (Registering Property dalam EoDB). Adapun kondisi sampai dengan saat ini antara lain: Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria masih rendah, Jumlah bidang tanah terdaftar nasional masih rendah, Jumlah bidang tanah bersertipikat yang diperkarakan di pengadilan Tata Usaha Negara maupun Perdata masih relatif tinggi, Informasi nilai tanah yang masih belum akurat serta Kelengkapan Cakupan dan Informasi serta Reliabilitas Peta Kadastral yang masih rendah.

3. Rendahnya kualitas dan ketersediaan Rencana Tata Ruang serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

Hal ini terjadi karena Rendahnya kualitas dan ketersediaan Rencana Tata Ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang. Kondisi selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan RDTR Kab/Kota masih rendah Jumlah peraturan daerah RDTR Kab/Kota baru 70 dari 1994 RDTR yang dibutuhkan atau 3,51%.

Isu Strategis Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan belum berkualitas dan berdaya saing. Penyusunan Isu Strategis ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut didasarkan pada beberapa permasalahan berikut yaitu :

- Kuantitas dan kualitas sdm pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut masih belum optimal baik PNS maupun PPNPN sehingga tingkat profesionalisme kinerja masih dalam tahap menuju profesionalisme yang diinginkan sesuai SOP. Faktor lain yang mungkin berkaitan dengan pelayanan yaitu penerapan e office yang baru saja dimulai. Budaya kerja yang masih mengikuti pola lama dan belum sepenuhnya dirubah mengikuti Reformasi Birokrasi.
- Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang masih belum memadai, luas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut seluas 19.967 M² dengan luas gedung kantor 585 M² , ruang arsip 150 M² dan luas tempat parkir 100 M² sehingga luas halaman dan sisa tanah yang belum ada bangunannya yaitu 19.282 M² masih memungkinkan untuk penambahan maupun perluasan sarana dan prasarana kantor.

Isu Strategis Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan Belum Sepenuhnya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Penyusunan Isu Strategis ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut didasarkan pada permasalahan berikut yaitu :

- Masih belum terselesaikan tanah terdaftar dan bersertipikat yang disebabkan oleh belum terintegrasinya batas Kawasan hutan dan non Kawasan hutan/Budidaya, selain itu keengganan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya dengan kata lain minat masyarakat yang masih rendah untuk melakukan pensertipikatan sehingga tujuan untuk memberdayakan / mensejahterakan masyarakat melalui pensertipikatan belum sepenuhnya tercapai

Isu Strategis Rendahnya kualitas dan ketersediaan Rencana Tata Ruang serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang. Penyusunan Isu Strategis ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut didasarkan pada permasalahan berikut yaitu :

- Masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang dikarenakan pengendalian pemanfaatan yang belum maksimal.

Secara khusus potensi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari analisa SWOT yaitu kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman/hambatan (Treats).

a. Kekuatan(Strength)

- Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan pencaangan ZI baik secara internal maupun eksternal.
- SDM Eselon III dan IV seluruhnya terisi sehingga dapat memperkuat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- SDM pada Jabatan Fungsional telah terisi dengan komposisi yang sesuai dengan jumlah Analis dan Koordinator yang dibutuhkan.
- SDM PPNPN dengan kemampuan yang cukup baik di sub bagian dan seksi yang berkontribusi secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan.

Sumber Daya Manusia dari tingkat Eselon III sampai dengan PPNPN sebagian merupakan tenaga muda yang produktif, yang hanya perlu di tingkatkan kreatifitas, etos kerjadanintegritasnya dengan membentuk budaya kerja yang lebih baik dari sebelumnya dan searah dengan kebijakan Reformasi Birokrasi.

b. Kelemahan(Weakness)

- Dukungan anggaran dan sarana/prasarana yang belum memadai, karena BMN yang terdaftar di Aplikasi SIMAK BMN masih banyak jumlahnya sedangkan kondisi riil sudah tidak dimungkinkan untuk digunakan dan beberapa barang bahkan tidak diketahui keberadaannya dikarenakan kesalahan penginputan data awal pada aplikasi BMN.
- Terbatasnya kesempatan ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk mengikuti diklat peningkatan kapasitas kemampuanASN diberbagaikompetensi.

c. Peluang (Opportunity)

- Adanya *political will* pemerintah untuk mewujudkan *good governance* yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan nasional melalui dibentuknya agen perubahan pada Kelompok Kerja ZonaIntegritas;
- Kebijakan Internal untuk bisa menyelesaikan layanan pertanahan sesuai SPOP dan menurunkan jumlah tunggakan diterimadimuka.
- Kebijakan reformasi birokrasi instansi pemerintah yang menuntut profesionalisme dalam melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan WBK/WBBM dengan meningkatkan kualitas SDM yang berintegritas melalui Pencanaan ZonaIntegritas
- Adanya perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kepolisian Resort Tanah Laut, Kejaksaan Negeri Tanah Laut, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Kalselteng dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin yang secara aktif dan koordinasi yang baik mendukung terhadap percepatan pelaksanaan kegiatan.

d. Ancaman/Hambatan(Treats)

- Resistensi terhadap upaya perubahan dalam ReformasiBirokrasi.
- Belum memadainya kemampuan dalam penyesuaian perkembangan Informasi dan Teknologi.
- Volume pekerjaan yang relative tinggi terkadang tidak berimbang dengan SDM pelaksananya.
- Tidak memadainya ruangan kantor dibanding dengan jumlah ASN dan PPNPN yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024. Visi dan Misi Kementerian tersebut berpedoman kepada Visi dan Misi Presiden terpilih dalam RPJMN. Visi yang terdapat di dalam Renstra K/L merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan. Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi Kementerian/Lembaga yang berupa rumusan umum upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya.

Adapun visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yaitu **Terwujudnya penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk mendukung tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut akan menjadi guidance, motivasi dan target kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun yang akan datang dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan dan yang terpercaya dan berstandar dunia guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam melayani masyarakat menuju “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong”.

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 Misi dengan uraian sebagai berikut: **Misi Pertama:** Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dioperasionalisasikan dengan berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek: (1) aspek ekonomi: dengan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang produktif; (2) aspek lingkungan: yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan; dan (3) aspek sosial: yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkeadilan.

Misi Kedua ini diemban oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mewujudkan visi kementerian sehingga disamping penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju.

Tujuan disusun sebagai implementasi atau penjabaran Misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Tujuan dan Sasaran menjadi penting untuk dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Penjabaran Tujuan ke dalam Sasaran Strategis disusun dengan memperhatikan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (Land Management Paradigm). Dilandasi prinsip-prinsip tersebut, Misi Pertama yaitu: “Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan” dilaksanakan untuk mencapai 2 Tujuan, yaitu:

1) Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat 2) Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Sedangkan Misi Kedua yaitu: “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” dilaksanakan untuk mencapai Tujuan : 3) Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing (disebut Tujuan 3) Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, dalam 5 tahun ke depan diarahkan pada Sasaran Strategis sebagaimana dituangkan dalam gambar berikut:

Gambar 4. Visi, Misi dan Sasaran Strategis



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional disusun dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2020- 2024, untuk mendukung capaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah:



Visi tersebut dipertajam dengan 9 (sembilan) Misi, yaitu:

Gambar 5



Misi RPJMN Tahun 2020-2024 berfokus pada peningkatan kualitas SDM, keberlanjutan kelestarian lingkungan dan kemajuan kebudayaan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta sinergitas tata kelola pemerintahan diakselerasi dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan berikut:

Gambar 6. 7 Agenda



Penekanan pembangunan lima tahun kedepan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pidato pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019 di hadapan MPR, yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7



2. Arah Kebijakan dan StrategiKementerian

Arah kebijakan yang dipilih Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 2020-2024 adalah dengan menerapkan paradigma manajemen pertanahan (*Land Management Paradigm/LMP*) yang terdiri dari *Land Tenure, Land Value, Land Use, Land Development* serta *Cadastre and Land Infrastructure Information* sebagai landasan untuk mencapai tujuan. Paradigma manajemen pertanahan diformulasikan sebagai kebijakan untuk

mengelola urusan tanah dan ruang, dalam hal ini perencanaan dan penataan ruang merepresentasikan fungsi *Land Use*. Pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah merepresentasikan fungsi *Land Tenure*, serta penilaian dan pengembangan pertanahan masing-masing merepresentasikan *Land Value* dan *Land Development*.

Tujuan Kementerian yang mengacu pada LMP sejalan dengan target pemerintah dalam mewujudkan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Strategi yang diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbasis LMP adalah penguatan aspek spasial (data bidang tanah terkait kepentingan hak, batasan dan tanggung jawab yang ditimbulkan dari penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan tanah dan ruang), aspek institusional (mekanisme, prosedur dan proses melibatkan para pihak terkait urusan tanah dan ruang), aspek legal (kebijakan dan peraturan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan Kementerian) yang berbasis data dengan cakupan yang lengkap, memiliki reliabilitas tinggi, dan transparan.

Dalam mewujudkan institusi berstandar dunia, diperlukan strategi, komitmen serta perspektif baru dalam menyikapi peralihan media layanan sehingga pada tahun 2022 dan 2023 layanan pertanahan dan tata ruang semakin mudah diakses dan transparan berbasis elektronik. Dimana saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah berhasil mengalihkan beberapa pelayanan menjadi layanan elektronik, seperti mengimplementasikan Hak Tanggungan, Rona dan Pengecekan elektronik secara nasional.

Salah satu ciri menonjol dalam penerapan LMP adalah kepastian informasi terkait bidang tanah. Dalam hal ini proses penyusunan output produk kadaster dan informasi pertanahan perlu disusun secara efisien dan efektif, meniadakan proses redundansi yang tidak perlu dan menutup celah yang ada. Dalam hal ini, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pencapaian misi pertama dan kedua melalui digitalisasi proses dan layanan sangat krusial untuk mendukung implementasi kebijakan pertanahan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di atas maka tema tahunan selama 5 (lima) tahun periode rencana strategis dijelaskan sebagai berikut. Fokus perencanaan di dua tahun pertama diawali dengan peningkatan kualitas pada tahun 2020- 2021. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berupaya melakukan percepatan dan peningkatan kapasitas untuk siap memasuki transformasi digital di tahun 2021. Hal ini meliputi percepatan pendaftaran bidang tanah di seluruh Indonesia, penyiapan kelengkapan data, infrastruktur fisik, metode layanan serta kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal utama mengingat sumber daya manusia merupakan penggerak utama untuk mewujudkan visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dimana diperlukan nilai-nilai organisasi yang bisa mengarahkan pegawai bergerak menuju ke tujuan yang sama, mengarahkan dan mendasari perilaku pegawai dalam menjalankan tugas, membentuk budaya kerja organisasi, sehingga dapat melayani masyarakat dengan kejelasan prosedur, biaya dan ketepatan waktu.

Dalam merumuskan strategi operasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, didasarkan pada permasalahan operasional yang ditemui oleh Kantor Pertanahan selama ini. Adapun permasalahan, arah kebijakan dan strategi penyelesaian masalah tersebut dapat terangkum

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1

No.	Permasalahan	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Belum menerapkan e-office secara keseluruhan bagi para pegawai baik PNS maupun PPNP	Kebijakan internal mendukung pelaksanaan E office	Mengoptimalkan penerapan e office dengan mengikutsertakan salah satu atau beberapa pegawai di pelatihan atau peningkatan kapasitas terkait E Office Sehingga nantinya bisa melanjutkan pembelajarannya di Kantor Pertanahan
2.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan pertanahan serta masih belum ada data yang jelas terkait batas antara kawasan kehutanan dan non hutan serta masih banyaknya tanah yang belum terdaftar	Perbaikan Peraturan internal serta standard kerja	Melakukan sosialisasi pertanahan secara intensif terhadap masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan menumbuhkan minat untuk mendaftarkan tanahnya dan juga perlunya perbaikan data terhadap tanah Tanah yang terdaftar maupun yang terdaftar serta sesuai dengan fungsinya.
3.	Masih banyaknya pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan tata ruang	Perbaikan data pemanfaatan tanah	Melakukan pengendalian pemanfaatan secara optimal dan peninjauan atau revisi kembali terhadap pemanfaatan tanah yang sudah ada dan menyesuaikan dengan tata ruangnya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, serta runtutan baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, sampai dengan Indikator Kinerja Kegiatan. Dalam hal ini akan disampaikan cascading capaian kinerja level Eselon II Kanwil pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang kemudian diupset ke Indikator Kinerja Program (IKP) level Eselon I serta diupset selanjutnya sampai dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) di level Kementerian. Adapun tabel cascading Level Kementerian tersebut sebagai berikut:

Gambar 8



1. Tujuan 1, Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis

Pada indikator pertama (Sasaran Strategis 1) Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah, maka formula yang digunakan adalah Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah. Ketimpangan pemilikan tanah terjadi akibat sebagian besar masyarakat memiliki total luas tanah yang proporsinya kecil dibandingkan dengan sebagian kecil masyarakat yang memiliki total luas tanah yang proporsinya besar. Untuk mengurangi ketimpangan ini dilakukan redistribusi tanah maupun pemberian hak atas tanah Negara kepada masyarakat, baik masyarakat pemilik tanah dengan luasan kecil maupun masyarakat yang sama sekali tidak memiliki tanah (landless).

Ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia masih menjadi isu yang perlu diselesaikan di Indonesia. IKSS ini diharapkan dapat mendukung sasaran makro pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 untuk menurunkan Rasio Gini Pendapatan menjadi 0,360-0,374 di tahun 2024. Orientasi penyelenggaraan pengelolaan pertanahan dalam pengurangan ketimpangan pemilikan tanah ini berkontribusi dalam mewujudkan sasaran pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek sosial.

Pada indikator kedua (Sasaran Strategis 1) Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria, dengan formula yang digunakan adalah Indeks Peningkatan Pendapatan per Kapita Penerima Reforma Agraria. Penerima program reforma agraria mendapatkan tambahan

aset berupa kepemilikan atas tanah yang bersertipikat. Kepemilikan atas sumber daya tanah tersebut akan meningkatkan kemampuan penerima program untuk berproduksi dan mendapatkan tambahan pendapatan. Selain itu, sertipikat yang dimiliki menyebabkan individu ataupun rumah tangga menjadi bankable.

Pada indikator ketiga (Sasaran Strategis 1) Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah dengan formula yang digunakan adalah Nilai Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. Kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah diwujudkan melalui pendaftaran tanah dan penanganan kasus pertanahan, termasuk pencegahan timbulnya kasus baru. Pendaftaran tanah dihasilkan dari kegiatan teknis, yuridis dan administratif atas data yuridis (bukti penguasaan atau kepemilikan tanah) dan data fisik, yaitu data yang menunjukkan kepastian obyek yang dihasilkan oleh kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Sedangkan penanganan kasus pertanahan dilakukan melalui penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Kepastian hukum juga termasuk aspek kepastian hak, pembatasan penggunaan haknya dan tanggung jawab atas hak yang dimilikinya yang didasarkan atas informasi rencana tata ruang (*Right, Restriction dan Responsibility*). Korelasi sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, bahwa: semakin banyak bidang tanah yang terdaftar dan bidang tanah tersebut semakin sedikit yang berperkara di pengadilan maka nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah tersebut semakin baik.

Pada indikator keempat (Sasaran Strategis 1) Peningkatan Kemudahan Investasi dengan formula yang digunakan adalah skor EODB Registering Property. Kemudahan investasi antara lain disebabkan oleh faktor-faktor : penyediaan tanah, kemudahan dan kejelasan prosedur, persyaratan dan biaya pengurusan hak atas tanah, kepastian hukum atas rencana tata ruang dan pemanfaatannya, kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah serta kelengkapan informasi spatial pertanahan dan transparansi informasi nilai tanah. Kepastian informasi tata ruang dapat mempercepat proses penerbitan perijinan pemanfaatan ruang. Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada faktor-faktor terjadinya peningkatan kemudahan investasi merupakan unsur penting bagi tercapainya sasaran strategis yang diindasikan dengan indikator EODB Registering Property ini.

2. Tujuan 2, Sasaran Strategis 2 dan Indikator Sasaran Strategis

Pada indikator pertama (Sasaran Strategis 2) Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang. Keberhasilan untuk mencapai sasaran strategis ini dipengaruhi oleh faktor-faktor (1) Rencana Tata Ruang; (2) Sinkronisasi dan (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang, termasuk terkendalinya luasan lahan pertanian berkelanjutan. Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam rencana tata ruang maupun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Rumus yang digunakan untuk mengukur ketercapaian indeks ini. Korelasi sasaran strategis dan sasaran kegiatan, bahwa semakin banyak Rencana Tata Ruang yang dihasilkan dan tidak terdapat pelanggaran dalam pemanfaatannya maka semakin ideal.

3. Tujuan 3, Sasaran Strategis 3 dan Indikator Sasaran Strategis

Indikator yang digunakan dalam Tujuan 3 pada Sasaran Strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi untuk menunjukkan sudah berkinerjanya *Good Governance*, melalui perubahan Mind Set dan Culture Set yang meliputi 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari: 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan, 3) Penataan dan Penguatan Organisasi, 4) Penataan Tata Laksana, 5) Penataan Sumber Daya Manusia, 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 7) Penguatan Pengawasan dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang kesemuanya diukur setiap tahun dan terangkum dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Penyusunan Cascading Renstra dari Level Kementerian, Level Program dan Level Kegiatan diterjemahkan dalam matrik target kinerja dan Pendanaan. Dalam matrik tersebut ditunjukkan bahwa Kegiatan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan berkontribusi langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan kemudian diupset langsung ke Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Level Kementerian), sehingga satuan kerja memiliki tanggung jawab yang besar dalam pencapaian target indikator tersebut.

4. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan Rencana Strategis sebagaimana yang telah direncanakan, diperlukan suatu kerangka pendanaan untuk membiayai semua program dan kegiatan pada setiap level organisasi. Skenario pendanaan selama tahun 2020-2024 yang telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur/sarana dan prasana, kapasitas dan kemampuan organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki, Kebijakan –kebijakan baru di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya serta pertumbuhan ekonomi nasional serta hasil-hasil pembangunan periode 2015-2019 baik hasil pembangunan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan maupun hasil pembangunan yang dilaksanakan kementerian-kementerian lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja kementerian. Total dana yang dibutuhkan tiap program kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Kerangka Pendanaan

No	Program	Alokasi (2020-2024)
1	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	20.516.833.000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Daerah)	3.535.717.000
2	Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah	14.850.762.000
3	Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah	7.973.168.000
4	Penyelenggaraan Penataan Keagrariaan di Daerah	2.668.453.000
5	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah	527.221.000
6	Penyelenggaraan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah	15.990.000
7	Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	2.412.634.000
Jumlah		52.500.778.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 disusun untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun mendatang yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diawali dengan penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra yang dilanjutkan penyusunan Rancangan Renstra, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan para ahli serta hasil evaluasi renstra pada periode 5 tahun sebelumnya. Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 mengusung Visi “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut diperlukan dukungan oleh segenap unsur dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta stakeholder yang bergerak dalam bidang pertanahan dan penataan ruang serta partisipasi publik.

Rencana Strategis Kantor Kabupaten Tanah Laut harus digunakan sebagai acuan kinerja dan dalam implementasinya Rencana Strategis ini akan dievaluasi dan dimonitoring setiap tahun, pada tengah periode dan akhir periode berlakunya Rencana Strategis. Selanjutnya Rencana Strategis ini akan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang didalamnya terdapat rencana kinerja dan penganggaran setiap tahunnya.

Pada akhirnya penyusunan anggaran akan lebih efektif dan efisien setiap tahunnya jika mampu direncanakan dengan baik sesuai jadwal yang telah ditetapkan, selain itu dengan adanya usulan dari daerah membantu pusat dalam mengatur jumlah kegiatan dan anggaran masing-masing daerah sesuai dengan peruntukkan dan sesuai dengan porsinya. Harapan besar bagi Kementerian ATR/BPN dengan adanya rencana yang baik dan tepat maka akan mampu membantu meningkatkan ekonomi nasional dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, perlindungan dan keikhlasan pada kita semua, sehingga seluruh amanah yang diberikan pada kementerian ini dapat diwujudkan, dan membawa kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia dan negeri yang kita banggakan ini

LAMPIRAN KERANGKA PENDANAAN

				RIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL												
Sasaran Program (Outcome)Sasaran Kegiatan (Output)Indikator			Lokasi (Kawil/Kantah)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Output (PO)	2	Data dan Informasi Bidang Tanah dan Ruang	Pusat	Bidang		50					520,000					
	3	Peta Bidang Tanah dan Ruang (Layanan)	Daerah	Hektar/Bidang	3,000	1,000	720	1,000	1,000	967,068,000	573,484,000	406,400,000	557,476,735	557,476,735		
	4	Peta Bidang Tanah dan Ruang (Buku Layanan)	Daerah	Bidang	10,010	35,050	5,000	5,000	5,000	5,005,000,000	5,020,035,000	1,100,855,440	1,100,855,440	1,029,835,940		
	5	Peta Bidang Tanah IK	Daerah	Bidang		160,000					230,574,000					
	6	Berita Acara Pengalihan	Daerah	Paket	35	35	5	5	5	105,100,000	222,900,000	216,200,000	216,200,000	216,000,000		
	7	Laporan Pembiayaan, Monitor, Supervisi Daerah	Daerah	Laporan	2	1	2	2	2	25,400,000	5,910,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000		
	8	Data Infrastruktur Kewilayahan	Daerah	Nilai/tahun												
	RIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL															
Sasaran Program (Outcome)Sasaran Kegiatan (Output)Indikator			Lokasi (Kawil/Kantah)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Output (PO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kebijakan (NSPK) IK 1	Pusat	MSPK												
	2	Peta Zona Nilai Tanah IK 1	Pusat dan Daerah													
	3	Peta Nilai Bidang Tanah IK 1	Pusat dan Daerah													
	4	Lisensi Portal Tanah (PNBP Operasional) IK 1	Pusat	SK												
	5	Layanan Pendaftaran Bidang Pengadaan Tanah (termasuk layanan permohonan pemetaan nilai tanah/PNDP operasional) IK 1	Daerah	Layanan												
	6	Bantuan Teknik Pendaftaran Peta Nilai Tanah IK 2	Daerah	Data Set												
	7	Nilai Aset Properti IK 1	Daerah	Aset												
	8	Pembaruan Peta Milik Tanah IK 1	Daerah	Bidang	100	400	400	400	400	10,023,000	34,835,000	34,835,000	34,835,000	34,835,000		
	9	Facilitasi Pendaftaran Tanah dan Ekonomi Perumahan IK 1	Daerah	Satuan Kerja	1	1				9626,000	150,000					
RIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL																
Sasaran Program (Outcome)Sasaran Kegiatan (Output)Indikator			Lokasi (Kawil/Kantah)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Output (PO)	2	Matrik Teknik Perencanaan Konsolidasi Tanah IK 2	Pusat dan Daerah	Kecamatan												
	3	Berita Acara Penerapan Desain Konsolidasi Tanah IK 1	Pusat dan Daerah	Bidang												
	4	Konsolidasi Tanah Seadanya IK 1	Daerah	Bidang												
	5	Data Spasial dan Teknis/Konsolidasi Tanah (data) IK 2	Pusat	Data												
	6	Bantuan Teknik pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah IK 1	Pusat dan Daerah	Data set												
	7	Basis Data Pendaftaran Tanah dan Pengembangan Pertanahan IK 1	Pusat dan Daerah	Data Set		1					13,100,000					
	8	Facilitasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Daerah	Satuan Kerja		1					150,000					
	RIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL															
Sasaran Program (Outcome)Sasaran Kegiatan (Output)Indikator			Lokasi (Kawil/Kantah)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah															1. Kantor Wilayah DPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
Sasaran Kegiatan	51	Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan														
Indikator Kinerja Kegiatan	51	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Daerah	Hektar												
Output (PO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kebijakan (NSPK) IK 1	Pusat	MSPK												
	2	Data Lokasi Indikator Pengadaan Tanah IK 1	Pusat dan Daerah	Data set		1					6,000,000					
	3	Basis Data Pengadaan Tanah IK 1	Pusat dan Daerah	Data Set												
	4	Pencadangan Tanah/Bank Tanah IK 1	Pusat	Lokasi												
	5	Facilitas Pengadaan Tanah dan Pencadangan Transaksi 1	Daerah	Satuan Kerja		1					150,000					

RIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL														
Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator		Lokasi (Kawwil/Kantah)		Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*
			Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Output (PO)	4.3.2 Penurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Daerah	Persentase											
	1. pergeseran konflik pertanahan secara kolabik antar instansi/lembaga	Pusat dan Daerah	Kasus											
	2. Pembinaan Pencegahan kejahatan pertanahan	Pusat	Kegiatan											
	3. Penyelesaian kejahatan pertanahan	Daerah	Kasus											
	4. Rancangan NSPK	Pusat	NSPK											
	5. Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Pusat dan Daerah	Kegiatan	0	1	1	1	1	67,000,000	67,000,000	67,000,000	67,000,000	67,000,000	
	6. Rekomendasi upaya penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Pusat dan Daerah	Rekomendasi	0	1	1	2	2	3,600,000	3,600,000	7,320,000	7,320,000	7,320,000	
7. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik	Pusat	Satker												

RIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL														
Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator		Lokasi (Kawwil/Kantah)	Sasaran	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pewangcaraan perkara pertanahan														1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	4.2	Terselenggaranya penanganan perkara pertanahan												
Indikator Kinerja Kegiatan	4.2	Jumlah penyelesaian penanganan perkara Pertanahan	Daerah	Kasus										
Output (RO)	1	Penanganan Perkara Pertanahan	Pusat dan Daerah	Kasus	0	1	2	2	2	-	20,270,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
	2	Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan	Pusat	Kasus										
	3	Supervis, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara	Pusat	Satker										

RIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT														
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL														
Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator		Lokasi (Kawwil/Kantah)	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana*		
			Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
Pendaftaran sengketa pertanahan														1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	4.1	Terselenggaranya sengketa Pertanahan												
Indikator Kinerja Kegiatan	4.1	Jumlah Penyelesaian Sengketa pertanahan	Daerah	Kasus										
Output (RO)	1	Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Pusat dan Daerah	Kasus	1	1	3	3	3	23,547,000	26,070,000	78,810,000	78,810,000	78,810,000
	2	Rancangan NSPK (Pusat)	Pusat	NSPK										
	3	Supervis, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan sengketa pertanahan	Pusat	Satker										
	4	Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Kontrolasi	Daerah	Satker	1	1	1	1	1	6,000,000	67,000,000	67,000,000	67,000,000	67,000,000

				RIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL										
Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator		Lokasi (Kawwil/Kantah)	Sasaran	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pendaftaran Tanah dan Ruang														1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	3.2	Terselenggaranya pendaftaran tanah dan pendaftaran ruang bawah tanah dan ruang atas yang bergengsi berdasarkan hukum dan berbasis elektronik												
Indikator Kinerja Kegiatan	3.2.1	Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang didaftarkan secara elektronik	Pusat	bidang										
	3.2.2	Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaktar	Daerah	Bidang Tanah										
Output (RO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Skema (NSPK)	Pusat	NSPK										
	2	Bidang tanah terdaktar	Daerah	Bidang	11,980	4,000	6,000	10,000	10,000	1,797,434,000	775,544,000	1,546,380,000	1,546,380,000	1,546,380,000
	3	Laporan Informasi Pertanahan	Daerah	Bidang	2,500	2,500	7,700	7,700	7,700	19,600,000	20,650,000	74,000,000	74,000,000	74,000,000
	4	Laporan Pemeliharaan Data Pertanahan	Daerah	Bidang	2,800	2,500	17,600	17,600	17,600	102,400,000	107,307,000	107,307,000	107,307,000	107,307,000

				RIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL												
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan / Output /Indikator			Lokasi (Kawwil/Kantah)	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*		
				Satuan	2019	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Penerapan Hak Tanah dan Ruang																1. Kantor Wilayah DPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	3.1.1	Terselenggaranya penerapan dan penerapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah tanah badan hukum dan perorangan														
	3.1.2	Terselenggaranya penerapan dan penerapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah tanah instansi pemerintah, BUMN dan BUMD														
Indikator Kinerja Kegiatan	3.1.1	Jumlah pelayanan atas penerapan penerapan hak atas tanah dan ruang pertanahan badan hukum dan perorangan	Pusat	NSPK												
	3.1.2	Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang didaftarkan	Daerah	Kepertanahan												
Output (RO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Skema untuk penerapan hak atas tanah	Pusat	NSPK												
	2	Surat Keputusan Penerapan Hak Atas Tanah Pertanahan Badan Hukum	Pusat dan Daerah	SK	500	500	1,000	500	500	173,450,000	106,250,000	464,268,000	100,000,000	1175,000,000	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT	
	3	Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Penerapan Hak Tanah dan Ruang Perorangan dan Badan Hukum	Pusat	Laporan												
	4	Surat Keputusan Penerapan Hak Ruang Bawah dan Ruang Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	Daerah	SK												
	5	Unit Laporan Pertanahan Khusus	Pusat	Unit												

			RIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL												
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			Lokasi (Kawwil/Kantah)	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*	
				Gesran	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		
Pengelolaan aset Pertanahan Tanah															1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	2.3	Terselenggaranya penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan													
Indikator Kinerja Kegiatan	2.3	Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis utpahan dalam rangka monitoring pengelolaan aset reforma agraria	Daerah	Data											
Output (RO)	1	Rancangan NSPK	Pusat	NSPK											
	2	Revisi Peraturan Tanah (Regional dan Nasional)	Pusat dan Daerah	Nasas											
	3	Data Potensi Pendaftaran Wilayah Perairan (Pulau-pulau Kecil, Perairan dan Wilayah Terumbu Karang)	Pusat dan Daerah	Data											
	4	Laporan Pertanahan Tanah (PMP)	Daerah	Laporan	42	45	30	30	40	30,940,000	27,225,000	22,900,000	22,900,000	24,000,000	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT
	5	Data Pendaftaran Tanah	Pusat dan Daerah	Data											

– 2024
Laut

RIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL																
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			Lokasi (Kawil/Kantah)	Target							Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Peningkatan Akses Reforma Agraria (Akas Reforma)																1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan KabupatenKota
Sasaran Kegiatan	22	Tenunjadnya pemberian Akses Reforma Agraria														
Indikator Kinerja Kegiatan	22	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses RA	Daerah	Kepala Keluarga												
Output (RO)	1	Peningkatan NSPK	Pusat	NSPK												
	2	Akses Reforma Agraria	Pusat dan Daerah	KK		99					426.052.000					KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT
	3	Database Pemilina Akses Reforma Agraria	Pusat dan Daerah	Data												
PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT BARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL																
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			Lokasi (Kawil/Kantah)	Target							Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Peningkatan Akses Reforma Agraria																1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan KabupatenKota
Sasaran Kegiatan	23	Tenunjadnya penguasaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan														
Indikator Kinerja Kegiatan	23	Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penguasaan reforma agraria	Daerah													
Output (RO)	1	Peningkatan NSPK	Pusat													
	2	Mencara Penetapan Tanah (Regional dan Setorral)	Pusat dan Daerah													
	3	Data Pokok Penetapan Wilayah Perseor, Pulau, pulau kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	Pusat dan Daerah													
	4	Layanan Penetapan Tanah (PNBT)	Daerah		42	45	38	38	40	38.040.000	37.225.000	22.590.000	22.590.000	24.200.000	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT	
	5	Data Penetapan Tanah	Pusat dan Daerah													
MATERI KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL																
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			Lokasi (Kawil/Kantah)	Target							Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Peningkatan Akses Reforma Agraria																1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan KabupatenKota
Sasaran Kegiatan	12	Tenunjadnya Hakikat Tanah dan Penguasaan (Penguasaan Tanah, Hakikat Tanah, Wilayah Perseor, Pulau, pulau kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu)														
Indikator Kinerja Kegiatan	12	Penguasaan Tanah dan Penguasaan (Penguasaan Tanah, Hakikat Tanah, Wilayah Perseor, Pulau, pulau kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu)	Daerah	Pusat												
Output (RO)	1	Peningkatan NSPK dan Penguasaan Tanah (Penguasaan Tanah, Hakikat Tanah, Wilayah Perseor, Pulau, pulau kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu)	Pusat	Pusat dan Daerah												
	2	Data Penguasaan Tanah dan Penguasaan (Penguasaan Tanah, Hakikat Tanah, Wilayah Perseor, Pulau, pulau kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu)	Daerah	Daerah		4	5	5	5	4	4	12.444.000	12.444.000	12.444.000	12.444.000	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT
	3	Data Penguasaan Tanah dan Penguasaan (Penguasaan Tanah, Hakikat Tanah, Wilayah Perseor, Pulau, pulau kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu)	Daerah	Daerah												